

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN UNTUK TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Hal

I. KATA PENGANTAR

II. BAB I

PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8

III. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2024.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPPA	42
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (DPMPPA).....	42
2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63

IV. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	68

V. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH	72
---------------------	-----------

VI. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dan melindungi Anak dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan peran seluruh masyarakat, pemerintah maupun swasta dalam mewujudkan keamanan, keadilan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari masyarakat, seiring dengan lajunya isu globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia. Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sosial dan pelayanan lainnya di barengi peningkatan pemberdayaan dan profesionalitas yang dibutuhkan seiring dengan hak-haknya masyarakat selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negatif dari persoalan sosial akibat dampak pembangunan semakin meningkat.

Adanya kasus-kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan karena permasalahan ekonomi keluarga dan pelecehan seksual pada anak dan perempuan yang justru sering terjadi di dalam lingkungan rumah tangga dikarenakan kurangnya pengamalan agama didalam rumah tangga serta perkembangan teknologi yang tidak terkendali, dimana anak-anak memiliki akses langsung dari kemajuan teknologi tersebut, permasalahan tersebut merupakan bukti telah terjadinya perampasan (deprivation) hak-hak azazi perempuan dan anak secara sewenang-wenang, maka perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu selalu ditingkatkan.

Penyusunan Renja Perubahan DPMPPA Kota Jambi Tahun 2025 disesuaikan dengan RPD Kota Jambi 2024-2026, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, tertuang dalam *RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025* di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagai acuan dalam rangka capaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi disusun berdasarkan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (K3)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419),
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56).

8. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Kelurahan.
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan.
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dan Adat.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
30. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender.
31. Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan
32. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045
33. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah untuk menentukan indikatif besarnya APBD kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu juga penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

2. TUJUAN

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Untuk Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
- c. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal.
- d. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang dalam rangka fasilitas pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
- e. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Sebagai tolak ukur dan alat kendali untuk mengevaluasi / penilaian kinerja DPMPPA Kota Jambi sampai dengan tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini dituangkan kedalam 4 (empat) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Tahun 2025 dalam Renja Perubahan PD pagu anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 12.113.880.000,- Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 maka dapat dilihat capaian hasil dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk program kegiatan dari masing-masing urusan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi antara lain adalah :

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk Program Kegiatan yang dicapai Tahun 2025 terdiri dari 8 (Delapan) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan, dimana realisasi kinerja pada Oktober 2025 adalah :

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Tar get %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	25.684.220	100	18,00	18,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	6.118.811.951	100	32,08	32,08
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	120.150.000	100	0,00	0,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	437.329.151	100	17,39	17,39

5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertibnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	572.406.339	100	0,00	0,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215.844.800	100	23,89	23,89
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	619.084.500	100	15,08	15,08
8.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	130.160.244	100	13,93	13,93
9.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	303.395.987	100	5,49	5,49
10.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan	64.997.700	100	0,00	0,00
11.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	243.596.845	100	15,26	15,26
12.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Yang Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Anak	61.575.464	100	10,76	10,76
13.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Anggotanya Diberdayakan	32.931.125	100	0,00	0,00
14.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	141.848.054	100	9,98	9,98

	Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
15.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Persentase Cakupan Kota Layak Anak Jumlah Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	187.043.418	100	32,36	32,36
16.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi GN AKSA, PATBM, dan Konvensi Hak anak	186.269.715	100	1,97	1,97
17.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA	169.208.898	100	12,05	12,05
18.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	88.400.000	100	0,00	0,00
19.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dan Peningkatan Dasawisma	2.395.141.589	100	14,84	14,84
Total			12.113.880.000			

Dari capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sampai dengan Oktober 2025 dari seluruh kegiatan yaitu 70,71%.

Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra DPMPPA pada umumnya sudah tercapai namun masih diperlukan upaya-upaya inovatif untuk meningkatkan dan menjamin kesinambungan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Kebijakan yang harus diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja:

1. Adanya upaya monitoring dan Evaluasi hasil yang lebih efektif
2. Membentuk Tim percepatan capaian program dan kegiatan

3. Membentuk pilot Projek di wilayah RT dan Kelurahan baik kampung Bahagia, Ramah Anak dll.

Lebih lengkapnya hasil evaluasi terdapat dalam lampiran TC-29. Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan pada Urusan Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas dan untuk mencapai target dimaksud maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, mendapatkan Anggaran Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada uraian dibawah ini yaitu :

Capaian kegiatan sampai dengan Per Oktober sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.548.661	100	97,40	97,40
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.135.559	100	97,92	97,92
Total			25.684.220			

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.798.085.171	100	74,58	74,58
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	313.580.600	100	76,90	76,90

3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.146.180	100	96,49	96,49
Total			6.118.811.951			

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	100	22,27	22,27
2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70.150.000	100	95,03	95,03
Total			120.150.000			

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16.086.533	100	87,76	87,76

2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	256.321.973	100	71,79	71,79
3.	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19.890.645	100	91,40	91,40
4	Fasilitasi kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.880.000	100	81,75	81,75
5	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.150.000	100	75,69	75,69
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0
Total			437.329.151			

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengadaan Mebel	Tersedianya Paket Mebel	231.234.549	100	44,08	44,08
2.	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya yang Disediakan	341.171.790	100	78,85	78,85
Total			572.406.339			

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

					Realisasi
--	--	--	--	--	-----------

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.844.800	100	93,21	93,21
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	202.000.000	100	68,12	68,12
Total			215.844.800			

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.733.800	100	72,10	72,10
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.409.000	100	74,76	74,76
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.630.200	100	78,99	78,99
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.311.500	100	78,80	78,80
Total			619.084.500			

8. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan**a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota	130.160.244	100	57,20	57,20
Total			130.160.244			

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	303.395.987	100	34,99	34,99
Total			303.395.987			

9. Program Perlindungan Perempuan

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.997.00	100	89,14	89,14
Total			243.596.845			

b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	67.337.145	100	85,54	85,54
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	176.259.700	100	76,31	76,31
Total			243.596.845			

10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	61.575.464	100	53,11	53,11
Total			61.575.464			

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32.931.125	100	52,40	52,40
Total			32.931.125			

11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7

1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	141.848.054	100	76,55	76,55
Total			141.848.054			

12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	187.043.418	100	91,68	91,68
Total			187.043.418			

13. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA	Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak, dan DRPPA	121.267.415	100	83,72	83,72

2.	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	65.002.300	100	84,62	84,62
Total			186.269.715			

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.178.598	100	61,47	61,47
2.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Koordinasi Layanan AMPK	111.030.300	100	48,46	48,46
Total			169.208.898			

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatnya kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	88.400.000	100	99,47	99,47

Total	88.400.000			
--------------	------------	--	--	--

14. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Targ et %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasili- tasi Tim Penggerak PKK dalam Penyeleng- garaan Gerakan Pem- berdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	779.361.086	100	29,26	29,26
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang DItingkat- kan Kapasitasnya	1.474.898.347	100	79,43	79,43
3.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapa- tan Asli Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	73.991.195	100	51,82	51,82
4.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaa- tan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	66.890.961	100	63,73	63,73
Total			2.395.141.589			

Untuk Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 dapat dilihat pada Daftar Lampiran I : Tabel T-C.29.

Dari hasil capaian rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan Rekapitulasi Capaian program dan kegiatan dari Realisasi Alokasi Anggaran Fisik dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu :

TABEL T-C 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TAHUN 2024 KOTA JAMBI**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ KABUPATEN		2025	2022	2023	2023		2024		
2	0	0			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	BB	BB			B		
2	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	76,5	76,65	76			76		
2	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

					Daerah	n Perangkat Daerah								
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	08	01	2.02		Admin-istrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	95%	95%	95%	95%	100%	95%		
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	30	30	30	100%	33	33	100%
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Pen-tausahaan dan Pen-gujian /Verifi-kasi	Jumlah Dokumen Pen-tausahaan dan	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	100%	37 Doku-men	37 Dokumen	100%

					Kuangan SKPD	Pen- gujian/Verifi- kasi SKPD								
2	0 8	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	0 8	0 1	2.0 5		Admin- istrasi Kepega- waian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	0 8	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka- pannya	Jumlah Pa- ket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	94 Paket	94 Paket	94 Paket	100%	94 Paket	94 Paket	100%
2	0 8	0 1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implemintasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan	6 Orang	7 Orang	4 Orang	3 Orang	75%	4 Orang	4 Orang	66,67%

						Perundang-Undangan								
2	08	01	2.06		Admin-istrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	18 Paket		
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	70 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket		
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	88,89%
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	15 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	22 Laporan	88%
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	80 Laporan	58 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	100%	80 Laporan	73 Laporan	91,25%

					Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Pena- tausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumah Dokumen Pena- tausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Doku- men	1000 Dokumen	2000 Doku- men	2000 Doku- men	100%	1500 Doku- men	1500 Doku- men	75%
2	0 8	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85					85		
2	0 8	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise- diakan	12 Unit	14 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	23 Unit		
2	0 8	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penun- jang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85					85		
2	0 8	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	365 Laporan	250 Laporan	250 Laporan	100%	250 Laporan	280 Laporan	100%

	0 8	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komu- nikasi, sum- ber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	36 Laporan		
2	0 8	0 1	2.0 9		Pemeli- haraan Ba- rang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pemeli- haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah								
2	0 8	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeli- haraan, Biaya Pemeli- haraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jab- atan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit		
2	0 8	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeli- haraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapan- gan yang Dipelihara dan dibayar- kan Pajak	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit		

					Dinas Oprasional atau Lapangan	dan Perizinannya								
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	40 Unit	49 Unit	49 Unit	100%	47 Unit		
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit		
2	08	02			Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarustamaan Gender (PUG)	75%	100%	50%	47%	94%	51%	66%	88%

2	0 8	0 2	2.0 1	0 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	39		37	37	100%	39		
2	0 8	0 2	2.0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	50%	97%	35%	35%	100%	40%		
2	0 8	0 2	2.0 2	0 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	39 Organisasi		37 Organisasi	37 Organisasi	100%	39 Organisasi		

						Kewenangan Kabupaten/ Kota								
2	0 8	0 3			Program Perlin- dungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	14,85					14,86		
2	0 8	0 3	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Dae- rah Kabu- paten/Kota	Jumlah So- sialisasi Per- lindungan Hak per- empuan dari Kekerasan Dalam ru- mah Tangga, Perlindungan Hak Per- empuan dari Tindak Pi- dana Perdaganga n Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerj aan	2 Kali							
2	0 8	0 3	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sink- ronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordi- nasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	2 Dokumen							

					terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	49	46	47	45	95,74%	48		
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas	50%	74,50%	40%	40,7%	101,75%	45%		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	Persentase Keluarga yang Mewujudkan	50%	133%	80%	78%	97,5%	45%		

					Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Kesetaraan Gender dan Anak								
2	08	04	2.01	02	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan					6 Laporan		
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/kota	Jumlah Lembaga yang Anggotanya Diberdayakan	15 Organisasi					10 Organisasi		

2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	200 orang	180 orang	180 orang	176 orang	97,78%	180 orang	180 Orang	90%
2	08	05			PROGRAM PENGEL-OLAAN SIS-TEM DATA GENDER	Cakupan Data Gender dan Anak	40%	25%	30%	29%	96,67%	35%		
2	08	05	2.01		Pengum-pulan Pen-golahan Ana-lisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelem-bagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	40%	25%	30%	29%	96,67%	35%		

2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pem-anfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pem-anfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	90%	80%	80%	70%	87,5%	90%		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah dan Dunia Usaha	Persentase Cakupan Kota Layak Anak	90%	80%	80%	70%	87,5%	80%		
						Jumlah Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	280 Anak	230 Anak	250 Anak	250 Anak	100%	275 Anak		

					Kewenangan Kab/Kota.										
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Non Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	22 Organisasi	22 Organisasi	22 Organisasi	22 Organisasi	100%	22 Organisasi			
									11 Kecamatan	11 Kecamatan					
									62 Kelurahan	62 Kelurahan					
2	08	07			Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani	100%					100%			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup	Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak	5 Kali	11 Kali	8 Kali	8 Kali	100%	5 Kali			

					Daerah Kab/Kota.										
2	08	07	2.01	03	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Ke-lurahan Layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Terpadu	5 Kegiatan					4 Kegiatan			
2	08	07	2.01	04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	150 Orang								
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

					Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota.	oleh Petugas UPTD PPA								
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	49 Anak	65 Anak	47 Anak	50 Anak	94%	48 Anak		
2	08	07	2.02	07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	23 Layanan					22 Layanan		
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	91%	88,2%	89%	89,12%	100%	90%		
2	13	05	2.01	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif	91%	87%	87%	88,24%	101,4%	90%		
						Persentase Lembaga Masyarakat	70%	54%	55%	57,35%	104,2%	60%		

					Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota.	(KPM) yang Aktif									
						Persentase RT yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
						Persentase Organisasi PKK yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
						Persentase Lembaga Masyarakat (LAM) yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Ke-lurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Ke-lurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Ke-lurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Ke-lurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	5 Lembaga			

2	1 3	0 5	2.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Laporan				1 Laporan		
2	1 3	0 5	2.0 1	0 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

					Pem-berdayaan Masyarakat dan Kese-jahteraan Keluarga	Penyeleng-garaan Gerakan Pem-berdayaan Masyarakat dan Kese-jahteraan Keluarga								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPPA**Tabel 2.2****Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Jambi**

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi 2024	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		90%	91%	100%	88,2%	89,12%	90%	
2	Predikat APE		Nindya	Nindya	Utama	-	Madya	Nindya	
3	Jumlah Jenis Data Gender dan Anak		46	47	48	-	-	46	
4	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO		0,011	0,012	0,013	-	-	0,011	
5	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Predikat Kota Layak Anak		Nindya	Nindya	Utama	Nindya	Madya	Nindya	

1.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi merupakan tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Urbanisasi dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga diharapkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan Pemberdayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, perempuan dan Anak memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran dari Aparatur Pelaksana. Karena itu Sumber Daya Manusia dan

pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi akan mengupayakan kemampuan sehingga menjurus kepada keterampilan (skill) sumber daya manusia melalui pengembangan program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pegawai dalam rangka mendukung pencapaian target program Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Isu-isu strategis yang berkembang berkaitan dengan permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak setelah diidentifikasi seluruh aspek di dalamnya, dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak telah dilaksanakan serangkaian kajian yang bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak yang mampu menjawab tantangan yang ada serta sejauh mungkin dapat memenuhi tuntutan segenap stakeholders. Namun demikian, masih terdapat permasalahan ataupun isu yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam melaksanakan visi dan misinya. Adapun isu-isu strategis DPMPPA Kota Jambi sebagai berikut :

1. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena keterbatasannya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
3. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.
4. Lembaga kelurahan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal.
5. Masyarakat terhadap Adat dan Budaya yang harus dilestarikan.
6. Masih tingginya jumlah masyarakat kurang mampu.
7. Bertambahnya masyarakat kurang mampu akibat dari pandemic covid-19.

8. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.
9. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi netral gender dan terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
10. Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.
11. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan.
12. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu di Legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.
13. Masih adanya kasus perdagangan perempuan dan anak (Trafficking)
14. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT dan Kasus Trafficking serta Penanganan Kasus-kasus permasalahan anak.
15. Masih adanya kasus tenaga kerja anak dibawah umur.
16. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam KDRT.
17. Belum adanya unit pelayanan khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.6. Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review rancangan Perubahan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana tersebut

pada tabel revidi terhadap rancangan perubahan renja SKPD Tahun 2025, sebagaimana tabel T-C. 31 terlampir.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

N O	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025					Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Cata- tan Pent- ing
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. .)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Ca- paian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program 1										
	Penunjang Urusan Pemerintahan Dae- rah/Kabupaten	DPMP PA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	8.109.310.961	Penunjang Urusan Pemerintahan Dae- rah/Kabupaten	DPMP PA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6.884.224.023	
	Kegiatan 1.1		Indikator Kegiatan 1.1			Kegiatan 1.1		Indikator Kegiatan 1.1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMP PA	Peningkatan Nilai AKIP	76,5	25.684.220	Perencanaan, Pengan- ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMP PA	Peningkatan Nilai AKIP	BB	61.743.529	
	Sub Kegiatan 1.1.1		Indikator Sub Kegiatan 1.1.1			Sub Kegiatan 1.1.1		Indikator Sub Kegiatan 1.1.1			
	Penyusunan Doku- men Perencanaan Perangkat Daerah	DPMP PA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	12.548.661	Penyusunan Doku- men Perencanaan Perangkat Daerah	DPMP PA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.252.370	
	Sub Kegiatan 1.1.2		Indikator Sub Kegiatan 1.1.2			Sub Kegiatan 1.1.2		Indikator Sub Kegiatan 1.1.2			

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMP PA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	13.135.559	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMP PA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	46.491.159	
	Kegiatan 2.1		Indikator Kegiatan 2.1			Kegiatan 2.1		Indikator Kegiatan 2.1			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMP PA	Tertib Administrasi Keuangan	95%	6.118.811.951	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMP PA	Tertib Administrasi Keuangan	95%	3.709.061.442	
	Sub Kegiatan 2.1.1		Indikator Sub Kegiatan 2.1.1			Sub Kegiatan 2.1.1		Indikator Sub Kegiatan 2.1.1			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	5.798.085.171	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	3.931.397.465	
	Sub Kegiatan 2.1.2		Indikator Sub Kegiatan 2.1.2			Sub Kegiatan 2.1.2		Indikator Sub Kegiatan 2.1.2			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	DPMP PA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37 Dokumen	313.580.600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	DPMP PA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37 Dokumen	373.482.982	
	Sub Kegiatan 2.1.3		Indikator Sub Kegiatan 2.1.3			Sub Kegiatan 2.1.3		Indikator Sub Kegiatan 2.1.3			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	DPMP PA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	7.146.180	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DPMP PA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	10.975.525	

			Laporan Keuangan Bu- lanan/Triwulanan/Se- mesteran SKPD					Laporan Keuangan Bu- lanan/Triwulanan/Se- mesteran SKPD			
	Kegiatan 3.2		Indikator Kegiatan 3.2			Kegiatan 3.2		Indikator Kegiatan 3.2			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMP PA	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	120.150.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMP PA	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	95.500.000	
	Sub Kegiatan 3.2.1		Indikator Sub Kegiatan 3.2.1			Sub Kegiatan 3.2.1		Indikator Sub Kegiatan 3.2.1			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMP PA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Pa- ket	70.150.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMP PA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	94 Paket	70.500.000	
	Sub Kegiatan 3.2.2		Indikator Sub Kegiatan 3.2.2			Sub Kegiatan 3.2.2		Indikator Sub Kegiatan 3.2.2			
	Bimbingan Teknis Implemintasi Pera- turan Perundang-un- dangan	DPMP PA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implemintasi Pera- turan Perundang-un- dangan	DPMP PA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	25.000.000	
	Kegiatan 4.1		Indikator Kegiatan 4.1			Kegiatan 4.1		Indikator Kegiatan 4.1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMP PA	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	427.079.119	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMP PA	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	569.396.859	
	Sub Kegiatan 4.1.1		Indikator Sub Kegiatan 4.1.1			Sub Kegiatan 4.1.1		Indikator Sub Kegiatan 4.1.1			

	Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	DPMP PA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16.086.533	Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	DPMP PA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	16.094.323	
	Sub Kegiatan 4.1.2		Indikator Sub Kegiatan 4.1.2			Sub Kegiatan 4.1.2		Indikator Sub Kegiatan 4.1.2			
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	DPMP PA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	256.321.973	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	DPMP PA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	247.320.538	
	Sub Kegiatan 4.1.3		Indikator Sub Kegiatan 4.1.3			Sub Kegiatan 4.1.3		Indikator Sub Kegiatan 4.1.3			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMP PA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	19.890.645	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMP PA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	26.523.450	
	Sub Kegiatan 4.1.4		Indikator Sub Kegiatan 4.1.4			Sub Kegiatan 4.1.4		Indikator Sub Kegiatan 4.1.4			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMP PA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	32.880.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMP PA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	21.950.000	
	Sub Kegiatan 4.1.5		Indikator Sub Kegiatan 4.1.5			Sub Kegiatan 4.1.5		Indikator Sub Kegiatan 4.1.5			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMP PA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	112.150.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMP PA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	214.700.000	
	Sub Kegiatan 4.1.6	DPMP PA	Indikator Sub Kegiatan 4.1.6			Sub Kegiatan 4.1.6		Indikator Sub Kegiatan 4.1.6			

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMP PA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMP PA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	42.808.548	
	Kegiatan 5.1		Indikator Kegiatan 5.1			Kegiatan 5.1		Indikator Kegiatan 5.1			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP PA	Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	572.406.339	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP PA	Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	323.514.155	
	Sub Kegiatan 5.1.1		Indikator Sub Kegiatan 5.1.1			Sub Kegiatan 5.1.1		Indikator Sub Kegiatan 5.1.1			
	Pengadaan Mebel	DPMP PA	Jumlah paket mabel yang disediakan	23 Unit	231.234.549	Pengadaan Mabel	DPMP PA	Jumlah paket mabel yang disediakan	138 unit	56.433.159	
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	DPMP PA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	341.171.790	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	DPMP PA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	323.514.155	
	Kegiatan 6.1		Indikator Kegiatan 6.1			Kegiatan 6.1		Indikator Kegiatan 6.1			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP PA	Tertib penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	215.844.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP PA			223.564.800	
	Sub Kegiatan 6.1.1		Indikator Sub Kegiatan 6.1.1			Sub Kegiatan 6.1.1		Indikator Sub Kegiatan 6.1.1			

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMP PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	13.844.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMP PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	21.564.800	
	Sub Kegiatan 6.1.2		Indikator Sub Kegiatan 6.1.2			Sub Kegiatan 6.1.2		Indikator Sub Kegiatan 6.1.2			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	DPMP PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	202.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	DPMP PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	202.000.000	
	Kegiatan 7.1		Indikator Kegiatan 7.1			Kegiatan 7.1		Indikator Kegiatan 7.1			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP PA	Tertib pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	619.084.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP PA	Tertib pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	573.125.733	
	Sub Kegiatan 7.1.1		Indikator Sub Kegiatan 7.1.1			Sub Kegiatan 7.1.1		Indikator Sub Kegiatan 7.1.1			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMP PA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	254.733.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMP PA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	259.082.800	
	Sub Kegiatan 7.1.2		Indikator Sub Kegiatan 7.1.2			Sub Kegiatan 7.1.2		Indikator Sub Kegiatan 7.1.2			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMP PA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	116.409.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMP PA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	89.840.720	
	Sub Kegiatan 7.1.3		Indikator Sub Kegiatan 7.1.3			Sub Kegiatan 7.1.3		Indikator Sub Kegiatan 7.1.3			

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMP PA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	96.630.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMP PA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	76.539.200	
	Sub Kegiatan 7.1.4		Indikator Sub Kegiatan 7.1.4			Sub Kegiatan 7.1.4		Indikator Sub Kegiatan 7.1.4			
	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	DPMP PA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	151.311.500	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	DPMP PA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	147.663.013	
1	Program 1		Indikator Program 1								
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	DPMP PA	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	91%	2.395.141.589	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	DPMP PA	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	90%	3.485.620.634	
	Kegiatan 1.1		Indikator Kegiatan 1.1								
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif	91%	2.395.141.589	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif	90%	3.485.620.634	
			Persentase Lembaga Masyarakat (KPM) yang Aktif	70%				Persentase Lembaga Masyarakat (KPM) yang Aktif	60%		
			Persentase RT yang Aktif	100%				Persentase RT yang Aktif	100%		
			Persentase Organisasi PKK yang Aktif	100%				Persentase Organisasi PKK yang Aktif	100%		

			Persentase Lembaga Masyarakat (LAM) yang Aktif	100%				Persentase Lembaga Masyarakat (LAM) yang Aktif	100%		
	Sub Kegiatan 1.1.1		Indikator Sub Kegiatan 1.1.1								
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	DPMP PA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	1.474.898.347	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	DPMP PA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	394.371.339	
	Sub Kegiatan 1.1.2		Indikator Sub Kegiatan 1.1.2								
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat	DPMP PA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	55.309.664	
	Sub Kegiatan 1.1.3		Indikator Sub Kegiatan 1.1.3								
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMP PA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	779.361.086	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMP PA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3	1.138.191.717	
	Sub Kegiatan 1.1.4		Indikator Sub Kegiatan 1.1.4								

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMP PA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50 dokumen	73.991.195	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	DPMP PA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3	112.011.404	
	Sub Kegiatan 1.1.5		Indikator Sub Kegiatan 1.1.5								
	Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMP PA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	66.890.961	Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMP PA	Jumlah Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	162.170.900	
	Sub Kegiatan 1.1.6		Indikator Sub Kegiatan 1.1.6			Sub Kegiatan 1.1.6		Indikator Sub Kegiatan 1.1.6			
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMP PA	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMP PA	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150 Unit	1.623.565.610	
2	Program 2		Indikator Program 2								
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPMP PA	Cakupan Data Gender dan Anak	40%	141.848.054	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPMP PA	Cakupan Data Gender dan Anak	35%	252.157.375	

	Kegiatan 2.1		Indikator Kegiatan 2.1								
	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	40%	141.848.054	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	35%	252.157.375	
	Sub Kegiatan 2.1.1		Indikator Sub Kegiatan 2.1.1								
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	DPMP PA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Dokumen	141.808.054	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	DPMP PA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	252.157.375	
						Penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	95.976.865	
3	Program 3	DPMP PA	Indikator Program 3								
	Program Pemenuhan Hak Anak		Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	90%	187.043.418	Program Pemenuhan Hak Anak	DPMP PA	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	90%	295.626.103	
	Kegiatan 3.1		Indikator Kegiatan 3.1								
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah dan	DPMP PA	Persentase Cakupan Kota Layak Anak	90%	187.043.418	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah dan	DPMP PA	Persentase Cakupan Kota Layak Anak	90%	295.626.103	

	Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.		JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	280 anak		Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.		JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	275 Anak		
	Sub Kegiatan 3.1.1		Indikator Sub Kegiatan 3.1.1								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha	22 Organisasi	187.043.418	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan hak anak Pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha	22 Organisasi	295.626.103	
4	Program 4		Indikator Program 4								
	Perlindungan Khusus Anak	DPMP-PPA	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani	100%	443.878.613	Perlindungan Khusus Anak	DPMP PA	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani	100%	504.946.717	
	Kegiatan 4.1		Indikator Kegiatan 4.1								
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Terpadu	5 Kegiatan	186.269.715	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak	5 kali	99.449.535	
	Sub Kegiatan 4.1.1		Indikator Sub Kegiatan 4.1.1								

	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kaabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA	DPMP-PPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KtA terpadu	4 Kegiatan	121.267.415	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	DPMP-PPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	99.449.535	
	Sub Kegiatan 4.1.2		Indikator Sub Kegiatan 4.1.2								
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DPMP PA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan pencegahan KTA	150 Orang	65.002.300	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DPMP PA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasii dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan pencegahan KTA			
	Kegiatan 4.2		Indikator Kegiatan 4.2								
	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA	100%	169.208.898	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA	100%	143.139.393	
	Sub Kegiatan 4.2.1		Indikator Sub Kegiatan 4.2.1								
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	DPMP PA	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	49 Orang	58.178.598	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	DPMP PA	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	143.139.393	

	Sub Kegiatan 4.2.2		Indikator Sub Kegiatan 4.2.2								
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DPMP PA	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	23 Layanan	111.030.300	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DPMP PA	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	20 Orang	193.338.000	
	Kegiatan 4.3		Indikator Kegiatan 4.3								
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen dan penanganan kasus	94 Orang	88.400.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen dan penanganan kasus	60 Orang	69.019.789	
	Sub Kegiatan 4.3.1		Indikator Sub Kegiatan 4.3.1								
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	DPMP PA	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	94 Orang	88.400.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	DPMP PA	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	60 Orang	69.019.789	
	Program 5		Indikator Program 5								
	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPMP PA	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	85%	433.556.231	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPMP PA	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	70%	644.520.241	
	Kegiatan 5.1		Indikator Kegiatan 5.1								

	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMP PA	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	75%	130.160.244	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	51%	183.618.671	
	Sub Kegiatan 5.1.1		Indikator Sub Kegiatan 5.1.1								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyenggaraan PUG kewenangan kabupaten/kota	DPMP PA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	39 Orang	130.160.244	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyenggaraan PUG kewenangan kabupaten/kota	DPMP PA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	39 PD	183.618.671	
	Kegiatan 5.2		Indikator Kegiatan 5.2								
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KAB/Kota.	DPMP PA	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	50%	303.395.987	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KAB/Kota.	DPMP PA	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	40%	460.901.570	
	Sub Kegiatan 5.2.1		Indikator Sub Kegiatan 5.2.1								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPMP PA	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	39 Organisasi	303.395.987	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPMP PA	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	200 Organisasi	460.901.570	
6	Program 6		Indikator Program 6								
	Peningkatan Kualitas Keluarga		Cakupan Keluarga Berkualitas	50%	94.506.589	Peningkatan Kualitas Keluarga		Cakupan Keluarga Berkualitas	45%	211.445.366	

	Kegiatan 6.1		Indikator Kegiatan 6.1								
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	DPMP PA	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	50%	61.575.464	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	DPMP PA	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	45%	161.952.806	
	Sub Kegiatan 6.1.1		Indikator Sub Kegiatan 6.1.1								
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	61.575.464	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	161.952.806	
	Kegiatan 6.2		Indikator Kegiatan 6.2								
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/kota	DPMP PA	Jumlah Lembaga yang Anggotanya Diberdayakan	15 Organisasi	32.931.125	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/kota	DPMP PA	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	10	49.492.560	
	Sub Kegiatan 6.2.1		Indikator Sub Kegiatan 6.2.1								

	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	DPMP PA	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	32.931.125	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	DPMP PA	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	49.499.560	
7	Program 7		Indikator Program 7								
	Perlindungan Perempuan	DPMP PA	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	0,012	308.594.545	Perlindungan Perempuan	DPMP PA	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan		257.679.541	
	Kegiatan 7.1		Indikator Kegiatan 7.1								
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan	2 Kali	64.997.700	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan	1 Kali	101.4999.660	
	Sub Kegiatan 7.2.1		Indikator Sub Kegiatan 7.2.1								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	64.997.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	DPMP PA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	101.4999.660	

	Kegiatan 7.2		Indikator Kegiatan 7.2								
	Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA	100%	243.596.845	Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA	100%	156.179.881	
	Sub Kegiatan 7.2.1		Indikator Sub Kegiatan 7.2.1								
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	DPMP PA	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	49 Orang	67.337.145	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	DPMP PA	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	48 Orang	114.037.881	
	Sub Kegiatan 7.2.2		Indikator Sub Kegiatan 7.2.2			Sub Kegiatan 7.2.2		Indikator sub Kegiatan 7.2.2			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	23 Layanan	176.259.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	22 Layanan	42.142.000	

1.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	BB	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi	Tertib Administrasi Keuangan	95%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jambi	Tertib Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jambi	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	85%	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	75%	

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	50%	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jambi	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	0,012	
		Jambi	Persentase Korban kekerasan terhadap perempuan yang di tangani	100%	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA	100 %	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jambi	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan	2 Kali	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jambi	Cakupan Keluarga Berkualitas	50%	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	50%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Jumlah Lembaga yang Anggotanya Diberdayakan	15	
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jambi	Cakupan Data Gender dan Anak	40%	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	40%	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jambi	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	90 %	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	
		Jambi	Jumlah Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	280 Anak	

7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jambi	Rasio Anak Korban Kekerasan yang ditangani	0,036	
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100%	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Terpadu	5 Kegiatan	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	84 Orang	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	Jambi	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	100 %	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Jambi	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	91%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Jambi	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif	91%	
			Persentase Lembaga Masyarakat (KPM) yang Aktif	70%	
			Persentase RT yang Aktif	100%	
			Persentase Organisasi PKK yang Aktif	100%	
			Persentase Lembaga Masyarakat (LAM) yang Aktif	100%	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi merupakan salah satu organisasi perangkat pemerintah kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Jambi, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak bentuk kegiatan yang sangat diperlukan adalah yang bersifat pelayanan, fasilitasi, regulasi dan motivasi. Kesemuanya itu diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi

NO	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Predikat Penghargaan Parahita Ekaprya Daerah (APE)
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Predikat Kota Layak Anak (KLA)
					Persentase Keselarasan Pelaksanaan Kampung Baha-gia

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan di formulasikannya tujuan strategik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Adapun TUJUAN STRATEGIK Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah:

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Tujuan:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 2) Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- 3) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Sasaran strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mencapai Tujuan Strategi tersebut diatas, maka SASARAN STRATEGIK dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 dapat dirumuskan dan dijabarkan dalam 5 (lima) Sasaran Strategik sebagai berikut:

Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator sasaran:

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Predikat Penghargaan Parahita Ekapraya Daerah (APE)
3. Predikat Kota Layak Anak (KLA)
4. Persentase Keselarasan Pelaksanaan Kampung Bahagia

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah.

Tabel 3.2.1

Tujuan Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Jambi

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,01
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,5
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80

Tabel 3.2.2

Sasaran Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Jambi

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.358
		Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Madya
		Predikat Kota Layak Anak	Utama
		Persentase Keselarasan Pelaksanaan Kampung Bahagia	80%

Tabel 3.2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025
1	Persentase Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	91%
2	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	14,38
3	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang	100%

	Ditangani	
4	Predikat APE	Nindya
5	Jumlah Jenis Data Gender dan Anak	47
6	Predikat Kota Layak Anak	Nindya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun rencana kerja tahun 2025 dan menguraikan dalam 8 (delapan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 12.113.880** (Dua Belas Milyar Seratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Delapan Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kota Jambi, Program Non urusan merupakan kegiatan rutin terdiri dari 1 (satu) program 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub. Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Pengadaan Mebel
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Urusan Wajib :

II. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - c) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - d) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif, dapat dikemukakan sebagaimana tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
1	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan

		Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
		2. PROGRAM PENGARUSUTMAAN GENDER DAN PEMBERERDAYAAN PEREMPUAN a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

		a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
		5. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang

		Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--

		- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
		6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Jambi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	08	01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	DPMPP A	B	8.109.310.961	APBD		BB	9.338.523.358
2	08	01	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	DPMPPA	76,5	38.404.220	APBD		76,5	26.971.103
2	08	01	02.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPPA	5 Dokumen	12.548.661	APBD		5 Dokumen	20.141.177
2	08	01	02.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	DPMPPA	5 Laporan	13.135.559	APBD		5 Laporan	6.829.926

						Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
2	08	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	DPMPP A	95%	6.118.811.951	APBD		95%	7.455.172.255
2	08	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPPA	48 Orang/Bulan	5.798.085.171	APBD		48 Orang/Bulan	7.083.627.053
2	08	01	02.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	DPMPPA	37 Dokumen	313.580.600	APBD		37 Dokumen	363.482.459
2	08	01	02.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DPMPPA	12 Laporan	7.146.180	APBD		12 Laporan	8.062.743
2	08	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	DPMPPA	100%	120.150.000	APBD		100%	120.500.000
2	08	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMPPA	100 Paket	70.150.000	APBD		94 Paket	70.500.000
2	08	01	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPPA	5 Orang	50.000.000	APBD		7 Orang	50.000.000
2	08	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	DPMPP A	100%	437.329.151	APBD		100%	563.235.000

2	0	0	02.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPPA	10 Paket	16.086.533	APBD		10 Paket	16.100.000
2	0	0	02.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPPA	7 Paket	256.321.973	APBD		7 Paket	252.250.000
2	0	0	02.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPPA	8 Paket	19.890.645	APBD		8 Paket	26.550.000
2	0	0	02.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPPA	25 Laporan	32.880.000	APBD		25 Laporan	44.035.000
2	0	0	02.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPPA	60 Laporan	112.150.000	APBD		60 Laporan	224.300.000
2	0	0	02.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPPA	100%	572.406.339	APBD		100%	332.750.000
2	0	0	020	0	Pengadaan Mabel	Jumlah paket mabel yang disediakan	DPMPPA	5 Unit	231.234.549	APBD		20 Unit	100.000.000
2	0	0	02.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPMPPA	10 Unit	341.171.790	APBD		32 Unit	232.750.000
2	0	0	02.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPPA	100%	215.844.800	APBD		100%	235.565.000
2	0	0	02.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPPA	150 Laporan	13.844.800	APBD		150 Laporan	33.565.000
2	0	0	02.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	DPMPPA	36 Laporan	202.000.000	APBD		36 Laporan	202.000.000

						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
2	08	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMPPA	100%	619.084.500	APBD		100%	604.330.000
2	08	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMPPA	19 Unit	254.733.800	APBD		19 Unit	260.455.000
2	08	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPPA	7 Unit	116.409.000	APBD		7 Unit	116.410.000
2	08	01	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPPA	40 Unit	96.630.200	APBD		48 Unit	76.150.000
2	08	01	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPPA	5 Unit	151.311.500	APBD		5 Unit	151.315.000
2	08	02			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	DPMPPA	85%	433.556.231	APBD		100%	805.648.159
2	08	02	02.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota yang melaksanakan PUG	DPMPPA	75%	130.160.244	APBD		90%	229.521.742
2	08	02	02.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	DPMPPA	39 Orang	130.160.244	APBD		39 Lembaga	229.521.742

2	08	02	02.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi perempuan	DPMPPA	50%	303.395.987	APBD		50%	576.126.417
2	08	02	02.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPPA	39 Organisasi	303.395.987			200 Orang	576.126.417
2	08	03			Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	DPMPPA	0,012	308.594.545	APBD		14,84	194.482.682
2	08	03	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi perlindungan hak perempuan dari kdrtp perlindungan hak perempuan dari TPPO dan perlindungan perempuan dalam ketenagakerjaan	DPMPPA	2 kali	64.997.700	DAK		2 kali	74.747.355
2	08	03	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	DPMPPA	2 Dokumen	64.997.700	DAK		2 Lembaga	74.747.355
2	08	03	02.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	DPMPPA	100 %	243.596.845	APBD		50 Orang	119.735.327

2	08	03	02.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	DPMPPA	49 Orang	67.337.145	APBD		50 Orang	119.735.327
2	08	03	02.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	DPMPPA	23 Layanan	176.259.700	DAK			
2	08	04			Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga berkualitas	DPMPPA	50%	94.506.589	APBD		55%	176.718.193
2	08	04	02.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang menunjukkan kesetaraan gender dan anak	DPMPPA	50 %	61.575.464	APBD			
2	08	04	02.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPPA	4 Dokumen	61.575.464	APBD			
2	08	04	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang anggotanya diberdayakan	DPMPPA	15 Organisasi	32.931.125	APBD			176.718.193
2	08	04	02.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPPA	160 Orang	32.931.125	APBD		43 Lembaga	176.718.193

2	0	0			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan data gender dan anak	DPMPPA	40%	141.848.054	APBD		45%	227.156.833
2	0	0	02.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas dan kuantitas dan gender dan anak	DPMPPA	40 %	141.848.054	APBD		45%	227.156.833
2	0	0	02.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	DPMPPA	6 Dokumen	141.848.054	APBD		6 Dokumen	227.156.833
2	0	0			Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	DPMPPA	90 %	187.043.418	APBD		90%	268.730.765
2	0	0	02.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Kota Layak Anak	DPMPPA	90 %	187.043.418	APBD		101 Lembaga	268.730.765
						Jumlah anak ikut dalam organisasi forum anak dan daerah		280 anak					
2	0	0	02.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DPMPPA	22 Organisasi	187.043.418	APBD		101 Lembaga	268.730.765
2	0	0			Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	DPMPPA	100%	443.878.613	APBD		7 kegiatan	336.739.573
2	0	0	02.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Terpadu	DPMPPA	5 Kegiatan	186.269.715	APBD		7 kegiatan	212.694.832

2	0	0	02.	0	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	DPMPPA	4 Kegiatan	121.267.415	APBD		4 Kegiatan	212.694.832
2	0	0	02	0	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan pencegahan KTA	DPMPPA	150 Orang	65.002.300	DAK			
2	0	0	02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	DPMPPA	100%	169.208.898	APBD		50 Orang	124.044.741
2	0	0	02.	0	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	DPMPPA	49 Orang	58.178.598	APBD		50 Orang	124.044.741
2	0	0	02.	0	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	DPMPPA	23 Layanan	111.030.300	DAK			
2	0	0	02.		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen penanganan kasus	DPMPPA	94 Orang	88.400.000	DAK			
2	0	0	02.	0	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	DPMPPA	94 Orang	88.400.000	DAK			
2	1	3			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		DPMPPA		2.395.141.589	APBD			2.794.000.437

2	1	0			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat ukum adat	DPMPP A	91 %	2.395.141.589	APBD		90%	2.794.000.437
2	1	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif	DPMPPA	91%	2.673.182.549	APBD		92%	2.794.000.437
3	3	5	1			Persentase Lembaga Masyarakat (KPM) yang Aktif		70 %					
						Persentase RT yang Aktif		100%					
						Persentase Organisasi PKK yang Aktif		100%					
						Persentase Lembaga Masyarakat (LAM) yang Aktif		100 %					
2	1	0	02.	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DPMPPA	5 Lembaga	1.474.898.347	APBD		5 Lembaga	1.457.806.667
2	1	0	02.	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMPPA	50 Dokumen	73.991.195	APBD		50 Dokumen	112.010.778
2	1	0	02.	0	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMPPA	2 Laporan	66.890.961	APBD		2 Laporan	162.170.733

2	1 3	0 5	02. 01	0 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMPPA	3 Dokumen	779.361.086	APBD		3 Dokumen	1.062.012.259
---	--------	--------	-----------	--------	---	--	--------	--------------	-------------	------	--	--------------	---------------

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Rencana Kerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagai penjabaran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.

Jambi, November 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi,



Dra. Hj .Noverintiwati Dewanti, ME

Pembina Utama Muda

NIP : 19711125 199201 2 001